

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT KETERGANTUNGAN
KEUANGAN DAERAH, BELANJA MODAL, DAN TEMUAN AUDIT BPK
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2017)**

(Skripsi)

Oleh

**ANDREIANSYAH
NPM 1711031084**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT KETERGANTUNGAN
KEUANGAN DAERAH, BELANJA MODAL, DAN TEMUAN AUDIT BPK
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2017)**

Oleh

ANDREIANSYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA AKUNTANSI
Pada Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH TINGKAT KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH, BELANJA MODAL, DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2017)

Oleh

ANDREIANSYAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan keuangan daerah, belanja modal, dan temuan audit BPK terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota. Penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang berjumlah 38 dengan periode pengamatan tahun 2015-2017. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, penggunaan kriteria dalam pemilihan sampel yaitu Kabupaten/kota yang mendapatkan skor EKPPD tahun 2015-2017 dan Kabupaten/kota yang menyajikan komponen laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota yaitu Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2015-2017. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Tingginya persentase jumlah DAU maupun dana perimbangan lainnya mengindikasikan ketidakmandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan program atau kegiatannya. Temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, semakin banyak kasus temuan audit, maka semakin rendah skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Kata kunci : Skor, Kinerja, Temuan, Belanja, Ketergantungan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF DEPENDENCE LEVEL REGIONAL FINANCE, CAPITAL EXPENDITURE, AND BPK AUDIT FINDINGS ON THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS (STUDY ON DISTRICT/CITY GOVERNMENTS IN LAMPUNG PROVINCE 2015-2017)

By

ANDREIANSYAH

This study aims to determine the effect of the level of dependence on regional finances, capital expenditures, and BPK audit findings on the performance of district / city governments. This research was conducted in districts / cities in Lampung Province, amounting to 45 with an observation period of 2015-2017 (15 x 3 years). The sampling method used in this research is purposive sampling method, the use of criteria in sample selection, namely districts / cities that get EKPPD scores in 2015-2017 and districts / cities that present district / city government financial report components, namely Budget Realization Report from 2015 -2017. The data used are secondary data. The data analysis in this study was carried out by using multiple linear regression test. The results showed that the level of regional financial dependence had a significant negative effect on the performance of the Regency / City Government in Lampung Province. The high percentage of the total DAU and other balancing funds indicates that local governments are not independent in financing their programs or activities. The BPK audit findings have a significant negative effect on the performance of Regency / City Governments in Lampung Province, the more cases of audit findings, the lower the performance score of regional government administration, while capital expenditure does not have a significant effect on the performance of Regency / City Governments in Lampung Province.

Keywords: Score, Performance, Findings, Shopping, Dependency.

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH TINGKAT KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH, BELANJA MODAL, DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2017)**

Nama Mahasiswa : **Andreiansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1711031084

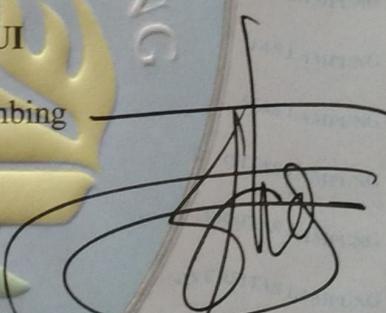
Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

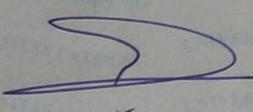


1. Komisi Pembimbing


Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Ak.,CA.
NIP 19710802 199512 2001


Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.
NIP 19620428 200003 1001

2. Ketua Jurusan Akuntansi


Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., C.A.
NIP. 197008171997032002

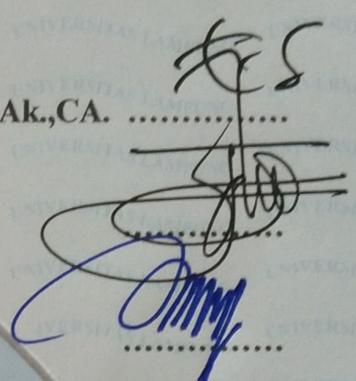
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Ak.,CA.

Sekretaris : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.

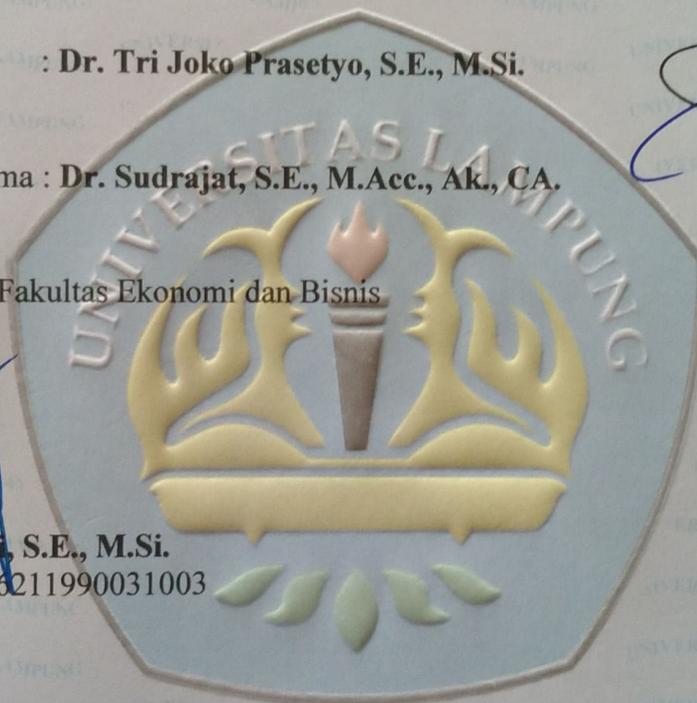
Penguji utama : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Juli 2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andreiansyah

NPM : 1711031084

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Belanja Modal, Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2017) ” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 07 Juli 2021



Andreiansyah

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 03 Maret 1999 sebagai anak pertama dari Bapak Jelami dan Ibu Rosmala Dewi.

Pendidikan Penulis diawali dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bandar Dalam tahun 2005 dan diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2011 Penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Negeri Agung yang diselesaikan pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 4 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 Penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama di bangku kuliah, Penulis aktif dalam beberapa organisasi diantaranya sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himakta) periode 2017/2018, sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis periode 2017/2018. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“The Way Get Started Is To Quit Talking And Begin Doing.”
Walt Disney

“Jangan Hidup Seperti Newton
Kebanyakan Gaya.”
Andreiansyah

“Barang Siapa Yang Bersungguh Sungguh, Sesungguhnya Kesungguhan Tersebut
Untuk Kebaikan Diri Sendiri.”
(Q.S. Al-Ankabut: 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu disanjungagungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus

kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Jelami dan Ibunda Rosmala Dewi yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti untuk kesuksesanku. Terima kasih yang tiada tara kepada ibu dan ayah karena telah merawat, membesarkan, dan mendidikku tanpa lelah.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan tiada henti

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Belanja Modal, Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2017) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M. Si., Akt. CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, bimbingan, saran, nasihat, dan pengalaman yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, bimbingan, saran, dan nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan masukan, nasihat, saran-saran yang membangun serta diskusi yang bermanfaat mengenai pengetahuan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Orang tuaku, Bapak Jelami dan Ibu Rosmala Dewi, terima kasih atas semua jerih payah selama membesarkan saya, selalu merawat, mencintai, mengiringi langkah saya dengan doa tanpa henti. Kasih sayang dan ucapan terima kasih selalu saya berikan untuk kalian.
8. Ragil Ayu Mangesti, terimakasih karena telah memberikan dukungan, bantuan dan doanya serta waktunya sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai dan bisa menuju kesuksesan bersama.
9. Teman-teman kontrakan hihi haha kuliahku Sandy, Jordan, Rafi, Taufik, Husain, Arif, Deddy, Avif, Samuel, Anton, Bangkit, Afif, Mardhi yang telah berjuang bersama, gabut bersama, pusing bersama selama proses perkuliahan ini. Terimakasih atas kenangan dan pembelajaran hidup yang berharga.
10. Teman-teman S1 Akuntansi 2017, terkhusus kelas Akuntansi Genap yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas informasi perkuliahan,

bantuan, kerja sama, dan dukungannya selama masa perkuliahan. Semoga sukses untuk kalian.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala dukungannya bagi keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandarlampung, 07 Juli 2021

Penulis

Andreiansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory).....	11
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	13
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	14
2.1.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	16
2.1.4.1 Pengertian EKPPD.....	16
2.1.4.2 Tujuan EKPPD	17
2.1.4.3 Tindak Lanjut Hasil EKPPD.....	18
2.1.4.4 Metodologi EKPPD	18
2.1.5 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah	23
2.1.6 Belanja Modal	24
2.1.7 Temuan Audit BPK.....	25
2.2. Pengembangan Hipotesis	27
2.2.1 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	27
2.2.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	28

2.2.3 Pengaruh Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	29
2.3. Kerangka Pemikiran	30
2.4. Penelitian Terdahulu.....	31
III. METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian	33
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	33
3.2.1 Variabel Dependen.....	33
3.2.2 Variabel Independen	34
3.2.2.1 Tingkat ketergantungan Keuangan Daerah	34
3.2.2.2 Belanja Modal	35
3.2.2.3 Temuan Audit BPK	36
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4. Metode Analisis Data.....	38
3.4.1 Statistik Deskriptif	38
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.4.2.1 Uji Normalitas	39
3.4.2.2 Uji Multikolonieritas	39
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	40
3.4.2.4 Uji Autokorelasi	41
3.4.3 Uji Hipotesis	41
3.4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda	41
3.4.3.2 Uji Koefisien Determinan (R^2).....	42
3.4.3.3 Uji Statistik F.....	42
3.4.3.4 Uji Statistik t.....	43
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1. Populasi dan Sampel Penelitian	44
4.2. Hasil Penelitian	45
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	45
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	47
4.2.2.1 Uji Normalitas	48
4.2.2.2 Uji Multikolonearitas.....	50
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	51
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	52
4.2.3 Uji Hipotesis	53
4.2.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda	53
4.2.3.2 Uji Koefisien Determinan (R^2).....	54
4.2.3.3 Uji Simultan.....	55
4.2.3.4 Uji Hipotesis	56
4.3. Pembahasan.....	58

4.3.1 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (X1) Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	58
4.3.2 Pengaruh Belanja Modal (X2) Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	60
4.3.3 Pengaruh Temuan Audit BPK (X3) Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	61
V. KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	64
5.3. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kategori Nilai Skor EKPPD	4
2. Kajian Penelitian Terdahulu.....	31
3. Penentuan Sampel Penelitian	44
4. Hasil Statistik Deskriptif	45
5. Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	48
6. Hasil Uji Multikolinieritas	50
7. Hasil Uji Autokorelasi.....	52
8. Hasil Analisis Regresi Berganda.....	53
9. Hasil Uji Determinasi R^2	55
10. Hasil Uji F.....	56
11. Hasil Uji T.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2017	4
2. Kerangka Pemikiran	30
3. Hasil Uji <i>Normal Probability Plot</i>	49
4. Hasil Uji Heteroskedastisitas	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Hasil Perhitungan Variabel Independen dan Dependen
- Lampiran 2.** Perhitungan Variabel Tingkat Ketergantungan
- Lampiran 3.** Perhitungan Variabel Belanja Modal
- Lampiran 4.** Rekapitulasi Jumlah Temuan Audit dan Skor EKPPD
- Lampiran 5.** Hasil Analisis Statistik Deskriptif
- Lampiran 6.** Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 7.** Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 8.** Heteroskedastisitas
- Lampiran 9.** Hasil Uji Autokorelasi
- Lampiran 10.** Hasil Analisis Linear Berganda
- Lampiran 11.** Hasil Uji Koefisien Determinasi
- Lampiran 12.** Hasil Uji F
- Lampiran 13.** Hasil Uji T

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1998, mulai pudarnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Salah satu alasannya karena permasalahan mengenai sistem tata kelola pemerintah yang buruk. Permasalahan itu juga timbul akibat tidak meratanya kontribusi dari pemerintah pusat ke daerah-daerah yang memiliki dan memberikan kekayaan alamnya untuk pemerintah pusat. Hal itu menimbulkan kesenjangan yang jauh antara daerah perkotaan besar dan daerah yang jauh dari perkotaan, yang membuat tuntutan - tuntutan masyarakat tidak terpenuhi.

Ketidakpuasan dari daerah terhadap pemerintah pusat yang telah mengeksploitasi kekayaan alamnya tidak diimbangi dengan pengoptimalan pembangunan di daerah tersebut. Hal ini berakibat munculnya gejolak dari masyarakat daerah yang menuntut mendapat kewenangan untuk dapat mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Setelah krisis moneter berakhir, tuntutan daerah untuk dapat mengatur dan mengelola daerahnya sendiri telah diterima berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan menurut Pasal 1 ayat 5 yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Dengan telah diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingannya, membuat peluang untuk setiap daerah mengembangkan potensi daerahnya masing - masing tanpa campur tangan langsung pemerintah pusat. Sehingga nantinya daerah - daerah otonom dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dalam hal perekonomian. Hal ini menuntut bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola potensi daerahnya masing – masing. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerah. Dalam pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahnya, pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkannya dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019. LPPD merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. . Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa LPPD berisikan informasi yang akurat dan memadai mengenai

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. LPPD mencakup informasi yang bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah (Sedyaningsih dan Zaky, 2015). Kepala daerah diwajibkan untuk menyerahkan LPPD kepada pemerintah pusat, agar pemerintah pusat dapat mengetahui pengelolaan serta pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah tersebut. Penyusunan LPPD menjadi suatu hal yang penting karena LPPD berisikan suatu pencapaian kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. LPPD yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai suatu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintahan daerah tersebut (Usman dan Misra, 2019).

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah perlu diadakannya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD). Dengan diadakannya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintahan pusat bisa mengetahui sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) merupakan proses penilaian kinerja pemerintah daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) menggunakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) sebagai bahan acuan utama dalam melakukan evaluasi. Hasil dari EKPPD berisikan laporan hasil evaluasi peningkatan kinerja penyelenggaraan

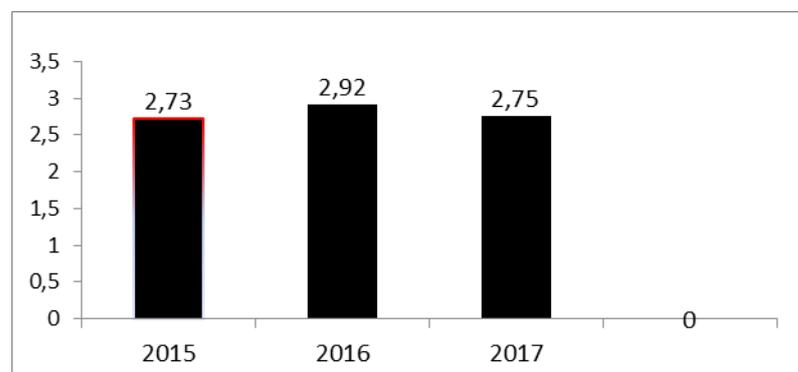
pemerintah daerah dan digunakan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan kebijakan pemerintahan untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pembentukan, penghapusan ataupun penggabungan daerah otonom (Putri dan Vita, 2020). Lampung merupakan salah satu provinsi dengan angka skor kinerja dalam kategori tinggi selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Penilaian kategori prestasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori nilai skor EKPPD

No	Skor	Keterangan Status
1	>3,00-4,00	Sangat tinggi
2	>2,00-3,00	Tinggi
3	>1,00-2,00	Sedang
4	00-1,00	Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009.

Berdasarkan penilaian terhadap rentang skor tersebut, skor kinerja Provinsi Lampung menempati status tinggi dengan rentang nilai >2,00-3,00. Berikut adalah grafik yang menunjukkan nilai skor kinerja Provinsi Lampung pada Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017.



Gambar 1. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2017

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pada tahun 2015 Provinsi Lampung memiliki skor kinerja sebesar 2,73 yang mana angka ini termasuk dalam kategori tinggi. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan angka skor kinerja pada Provinsi Lampung yaitu dari 2,73 menjadi 2,92. Tingginya skor kinerja ini menunjukkan kualitas kerja pemerintah daerah Provinsi Lampung yang baik. Pada tahun 2017 terjadi penurunan angka skor kinerja pada Provinsi Lampung menjadi 2,75. Namun, penurunan skor kinerja ini tetap berada pada kategori tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mempertahankan skor kinerja selalu dalam kategori tinggi selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut melatarbelakangi penulis memilih Provinsi Lampung sebagai lokasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kinerja pemerintah daerah dapat diukur dari pengelolaan keuangan daerah, ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada peraturan, penataan kelembagaan, pengelolaan barang milik daerah, pemberian fasilitas kepada masyarakat, dan sebagainya. Atas dasar tersebut peneliti menggunakan tingkat ketergantungan keuangan daerah, belanja modal, dan temuan audit BPK sebagai variabel independen penelitian. Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah gambaran seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan

daerah. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 “Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Anggaran belanja daerah telah ditentukan di awal periode anggaran yang mana telah dibagi ke dalam masing - masing keperluan belanja daerah. Salah satu komponen di dalam belanja daerah adalah belanja modal. Belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah “pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Belanja modal ini juga meliputi segala biaya pemeliharaan yang sifatnya akan menambah atau mempertahankan umur ekonomis atau manfaat dari aset tersebut, maupun untuk memperbaiki kualitas aset.

Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik pemerintah harus bersifat transparan atau membuka informasi seluas-luasnya agar segala pihak yang berkaitan dalam pemerintahan secara horizontal maupun vertikal dapat ikut serta berperan aktif dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah juga harus mempertanggung jawabkan segala informasi yang telah diberikan ke publik berdasarkan prinsip akuntabilitas, terutama dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk itu perlu adanya pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, yaitu dengan cara mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatan

pembukuan dan bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai laporan kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2017). Adapaun audit pemerintahan atau audit sektor publik adalah pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah berserta catatan dan bukti pendukungnya mengenai kewajaran, kepatuhan, dan kinerja pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang bertugas untuk mengaudit atau memeriksa laporan keuangan pemerintah dan berwenang untuk memberikan opini audit atas laporan keuangan pemerintah tersebut. Setiap periode anggaran berakhir, BPK akan mengaudit laporan keuangan pemerintah dan memberikan opininya terhadap laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Opini yang diberikan juga dipertimbangkan melalui temuan audit yang ditemukan atas kegiatan pemeriksaan tersebut, sehingga temuan audit juga akan mempengaruhi opini yang akan diberikan oleh BPK.

Hasil dari penelitian sebelumnya, Artha,dkk (2015) menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, belanja modal, leverage dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Afrian (2016) menunjukkan hasil bahwa semua variabel independen yaitu tingkat kekayaan daerah, area perbelanjaan, temuan audit BPK, dan leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sedyaningsih dan Zaky (2015) Tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan, sedangkan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah dan realisasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Andani,dkk (2019) ukuran pemerintah daerah dan opini audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi, sedangkan kemakmuran daerah dan belanja modal tidak mempengaruhi kinerja pemerintah provinsi. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan masih terdapat perbedaan pengaruh yang tidak konsisten antara variabel independen ukuran pemerintah daerah, belanja modal, kekayaan pemerintah daerah, dan temuan audit BPK terhadap variabel dependen kinerja pemerintah daerah. Maka penulis merumuskan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Belanja Modal, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2017)". Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah dan pengaruh temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
2. Apakah belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
3. Apakah temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui pengaruh temuan audit BPK terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan teoritis dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenisnya, sehingga landasan teoritis tersebut dapat terus diuji validitasnya dan dapat digeneralisasikan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dan menjadi landasan dalam mengambil keputusan pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- b. Memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dengan berbagai faktor tertentu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah suatu kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Prinsip utama pada teori ini adalah mengenai hubungan kerja antara pihak yang memberikan wewenang (principal) yaitu pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer.

Teori keagenan ini muncul, karena adanya permasalahan antara principal dan agen yang masing – masing memiliki tujuan yang berbeda. Teori keagenan (*agency theory*) dilandasi oleh beberapa asumsi. Asumsi - asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis yaitu, asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi (Eisenhardt, 1989). Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai risiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian menekankan bahwa adanya konflik antar anggota organisasi dan adanya

asimetri informasi antara principal dan agen, sedangkan asumsi informasi menekankan bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Teori keagenan dalam pemerintahan menjelaskan hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dengan masyarakat sebagai principal. Masyarakat berkedudukan sebagai principal karena Indonesia menerapkan sistem demokrasi, yang mana salah satu pengertiannya yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat sebagai tingkat tertinggi dalam kedudukannya dalam suatu negara atau pemerintah. Sehingga masyarakat yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menjalankan tugas pemerintahan untuk mengatur dan mengelola suatu negara ataupun daerah. Pemerintah sebagai penerima wewenang dari masyarakat untuk menjalankan tugas - tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Masalah yang akan timbul dalam keagenan antara anggota pemerintah dan masyarakat seperti cenderung untuk memaksimalkan utiliti (*self interest*) dalam menentukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena anggota pemerintah sebagai agen yang memiliki keunggulan informasi mengenai aturan dan kebijakan dalam pemerintah daripada masyarakat yang sebagai principal yang hanya memiliki informasi hasil dari kegiatan pemerintah tersebut. Akibatnya pemerintah ataupun eksekutif pemerintah memanfaatkan wewenang tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan masyarakat.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 paragraf 3 definisi Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Pemerintah dituntut untuk mengelola dan mengungkapkan laporan keuangannya secara transparan dan akuntabel. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mewajibkan pemerintah pada segala tingkat baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai parameter dalam mengukur capaian kinerja pemerintah dan juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah di periode berikutnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundangundangan selama satu periode anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga merupakan alat

pertanggungjawaban pemerintah terhadap hasil kinerja selama periode tersebut. Laporan keuangan ini akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa kewajaran atas laporan keuangan yang telah dihasilkan.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan (Mangkunegara, 2005). Kinerja diartikan sebagai seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch & Keeps, 1992).

Kinerja yang telah dilakukan dapat diukur untuk menilai apakah kinerja tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja (*Performance Measurement*) adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (Moehariono & Si, 2012). Hasil dari pengukuran tersebut akan digunakan sebagai umpan balik untuk memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik bagi perusahaan untuk menyesuaikan atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 “Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak”. Pengukuran kinerja pemerintah daerah tidak hanya tentang kinerja keuangan saja, namun juga mencakup kinerja

non keuangan. Pemerintah daerah yang memiliki karakteristik *pure non profit organization* mempunyai tanggung jawab yang besar. Pemerintah daerah bertanggung jawab di bidang ekonomi dan sosial. Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah memerlukan indikator yang digunakan untuk mengetahui prestasi yang telah dicapai dari hasil kinerja yang telah dilakukan. Menurut (Mahsun, 2012) Terdapat 6 indikator kinerja pemerintah daerah. Pertama, indikator masukan (*input*) misalnya jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang diperlukan, jumlah infrastruktur, jumlah waktu yang digunakan.

Kedua, indikator proses (*process*) misalnya ketaatan pada peraturan perundang – undangan dan rata – rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa. Ketiga, indikator pengeluaran (*output*) misalnya jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa. Keempat, indikator hasil (*outcome*) misalnya tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai. Kelima, indikator manfaat (*benefit*) misalnya tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat. Keenam, indikator dampak/pengaruh (*impact*) misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, adalah sebagai berikut (Halim dan Syam, 2014: 125).

- 1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, maksudnya adalah untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.

Akibatnya, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik

- 2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

2.1.4.1 Pengertian EKPPD

Merujuk pada PP No. 6 Tahun 2008 disebutkan bahwa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah LPPD. Selain sumber informasi utama sebagaimana dimaksud sebelumnya (LPPD), berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008 ada sumber lain yang dapat digunakan sebagai sumber informasi pelengkap yang dapat berupa:

- 1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 2) Informasi keuangan daerah;
- 3) Laporan kinerja instansi pemerintah daerah;

- 4) Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- 5) Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah;
- 6) Laporan kepala daerah atas permintaan khusus
- 7) Rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah;
- 8) Laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen;
- 9) Tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD; dan
- 10) Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.

2.1.4.2 Tujuan EKPPD

Berikut ini maksud dan tujuan EKPPD:

- 1) Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang direncanakan;
- 2) Untuk membandingkan tingkat capaian kinerja antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam wilayah provinsi dan nasional;
- 3) Sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 4) Sebagai dasar Pemerintah memberikan penganugerahan kepada pemda yang dinilai berkinerja tertinggi hasil EKPPD terhadap LPPD;

- 5) Sebagai dasar Pemerintah melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah, sebagaimana Perpres No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

2.1.4.3 Tindak Lanjut Hasil EKPPD

- 1) Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja rendah hasil EKPPD, akan dilakukan peningkatan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perpres No. 59 Tahun 2012;
- 2) Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi hasil EKPPD terhadap LPPD, diusulkan untuk diberikan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi selama 3 tahun berturut-turut hasil EKPPD terhadap LPPD, diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.4 Metodologi EKPPD

Metode EKPPD dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73

Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah):

1. Indeks Capaian Kinerja

Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian padatataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan.

- 1) Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD, terdiri dari 13 aspek yaitu :
 - a) Ketentraman dan ketertiban umum daerah;
 - b) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
 - c) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah;
 - d) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - e) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
 - f) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
 - g) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
 - h) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah;

- i) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
 - j) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
 - k) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD;
 - l) Pengelolaan potensi daerah; dan
 - m) Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM. Penilaian 8 aspek administrasi umum yang diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yaitu:
- a) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c) Tingkat capaian SPM;
 - d) Penataan kelembagaan daerah;
 - e) Pengelolaan kepegawaian daerah;
 - f) Perencanaan pembangunan daerah;
 - g) Pengelolaan keuangan daerah; 8) Pengelolaan barang milik daerah; dan

- h) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.
- 3) Penilaian aspek Tingkat Capaian Kinerja (pada poin 3) dibagi menjadi 2 yaitu :
- a) 1. Urusan Wajib
 - b) Urusan Pilihan
- 4) Metode pemberian skor untuk indeks capaian kinerja dan kesesuaian materi meliputi:
- Penggabungan pada IKK yang belum ada kriteria tingkat capaian melalui tahapan:
- a) Penggabungan IKK;
 - b) Dilakukan normalisasi data melalui rumus;
 - c) Dilakukan rata-rata nilai normalisasi; dan
 - d) Pemberian skor.
- Tanpa penggabungan pada IKK yang hanya 1 (satu) isian dari dua pilihan atau menyebutkan banyak daftar atau jumlah yang diisi dari daftar atau jumlah yang ditentukan. Pemberian skor pada masing IKK meliputi :
- a) $(1,25\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 4$
 - b) $> (\text{rata-rata normalisasi})$ sampai dengan $1,25\%$ rata-rata normal = 3
 - c) $> (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi})$ sampai dengan rata-rata normal = 2
 - d) $< (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 1$

Tingkat pemberian skor :

- a) Tingkat IKK;
- b) Tingkat urusan;
- c) Tingkat aspek;
- d) Tingkat capaian kinerja;
- e) Tingkat Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Indeks Kesesuaian Materi

Penilaian variabel indeks kesesuaian materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan pada LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan sesuai PP Nomor 3 Tahun 2007, yang meliputi: Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, dan Kelengkapan Laporan (RPJMD dan Gambaran Umum Daerah), terdiri dari:

- 1) Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan) dinilai kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.
- 2) Tugas pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan hanya dinilai kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 karena tugas yang diterima atau diberikan daerah sangat bervariasi.
- 3) Kelengkapan laporan hanya dinilai berdasarkan kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 untuk menilai konsistensi sistematika pelaporan, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada strategi,

kebijakan, dan prioritas daerah yang dituangkan dalam RPJMD, sedangkan gambaran umum daerah penting untuk dilaporkan karena menunjukkan potensi daerah serta sumber daya ekonomi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah

2.1.5 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi Dana Perimbangan (DP) (Bisma & Susanto, 2010). Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah gambaran seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satu pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Halim, 2012). Dana alokasi umum ini diberikan dari pemerintah pusat kepada masing – masing daerah. Berkaitan dengan desentralisasi dan perimbangan keuangan pada pemerintah daerah, pemerintah pusat melakukan transfer dana, yang tujuannya agar dana tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan

pelaksanaan desentralisasi fiskal, dana yang diberikan ke pemerintah daerah menjadi cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana dan pelaporan keuangannya. Sehingga nantinya tujuan desentralisasi melalui transfer dana ke pemerintah daerah yaitu dapat meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dapat tercapai.

2.1.5 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan (Halim, 2012). Belanja modal adalah salah satu komponen dari belanja daerah. Belanja modal ini adalah kewajiban daerah selama tahun periode anggaran tersebut. Belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah “pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Belanja modal terdiri dari 5 jenis, yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya. Belanja modal digunakan untuk kepentingan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta menunjang kegiatan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, “Belanja modal adalah pengeluaran aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah”. Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan aset adalah salah satu tahapan validasi dalam penetapan belanja modal. Syarat untuk penetapan kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan aset adalah :

1. Pengeluaran belanja tersebut menyebabkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan.
2. Pengeluaran anggaran tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, dan volume aset.
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut
 - a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah Rp300.000.
 - b. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah Rp10.000.000.
4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

2.1.6 Temuan Audit BPK

Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan - pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan -pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil - hasilnya kepada pemakai yang

berkepentingan (Mulyadi, 2011). Audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan (Arens et al., 2011). Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara” menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.

Dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan dalam pemerintah terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaaan oleh BPK berupa opini/pendapat, temuan audit, dan kesimpulan atau rekomendasi. Temuan audit BPK adalah kasus - kasus hasil pemeriksaan yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan dari ketentuan pengendalian intern dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. BPK melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah dua kali selama setahun. Hasil dari pemeriksaan BPK dilaporkan dan juga dipublikasikan di website <https://www.bpk.go.id/>

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Tingkat ketergantungan setiap daerah berbeda yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari perbedaan dana yang ditransfer pemerintah ke pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Halim, 2012). Jumlah DAU dapat mempresentasikan tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah dengan membandingkannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi hasil perbandingan tersebut, berarti menunjukkan daerah tersebut sangat bergantung pada pemerintah pusat. Hal itu juga dapat menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah, apakah sudah dapat dikatakan optimal. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis memilih DAU untuk menghitung besarnya tingkat ketergantungan keuangan daerah. Tingginya persentase jumlah DAU maupun dana perimbangan lainnya mengindikasikan ketidakmandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan program atau kegiatannya. Ketidakmandirian tersebut nantinya dapat menyebabkan kinerja pemerintah daerah juga rendah (Qowi dan Prabowo, 2017). Menurut Sedyaningsih dan Zaky (2015) membuktikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H1 : Tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin Sularso & Restianto (2011). Salah satu tujuan adanya anggaran belanja modal adalah agar infrasturuktur daerah - daerah dapat sesuai dengan apa yang diperlukan atau diprioritaskan setiap daerah. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu hasil dari penggunaan anggaran belanja modal. Dengan adanya infrasturuktur yang baik, diharapkan tingkat pelayanan terhadap masyarakat juga meningkat. Hal itu dapat menjadi dasar dalam penilaian kinerja pemerintah.

Belanja modal berkaitan dengan investasi jangka panjang yang dilakukan pemerintah daerah terhadap daerahnya sendiri. Belanja modal juga dapat dijadikan alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga belanja modal juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah harus dapat mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan anggaran belanja modal dengan baik, sehingga tujuan - tujuan adanya anggaran belanja modal dapat tercapai dengan maksimal. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Andirfa,dkk (2016) yang membuktikan belanja modal berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H2 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

2.2.3 Pengaruh temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

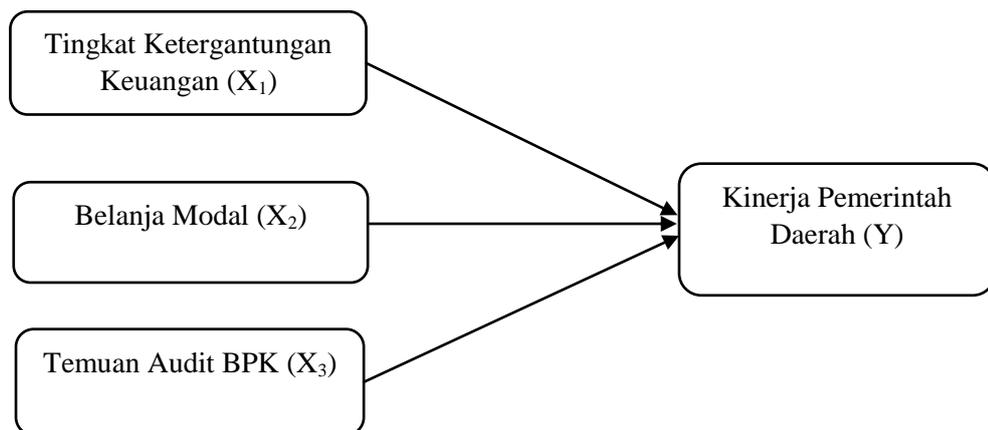
Temuan audit BPK merupakan temuan dalam proses pemeriksaan oleh BPK atas kesalahan atau kasus pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerja keuangan dan non keuangan pemerintah. BPK melakukan pemeriksaan rutin setiap tahunnya kepada pemerintah dan juga melaporkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Dengan adanya pemeriksaan yang rutin dilakukan, pemerintah daerah akan berusaha untuk mengoptimalkan dalam melaporakan keuangan dan kinerjanya.

Sehingga hasil dari pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan. Semakin banyak kasus atau pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah, berarti semakin buruk kinerja yang dilakukan. Dan semakin banyak temuan audit BPK, berarti semakin buruk kinerja pemerintah Wijayanti & Suryandari (2020). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Sedyaningsih dan Zaky (2015), bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H3 : Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat ketergantungan keuangan daerah, belanja modal, dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen penelitian. Berikut adalah gambar kerangka pemikiran penelitian ini.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Peni Sedyaningsih Achmad Zaky (2015)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2012)	Tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Sedangkan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah dan realisasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan.
2	Risma Diri Artha, Prayitno Basuki, dan Alamsyah MT (2015)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Ntb)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, belanja modal, leverage dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3	Galang Afrian (2016)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit (BPK) Dan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau	Semua variabel independen yaitu tingkat kekayaan daerah, area perbelanjaan, temuan audit BPK, dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
4	Mulia Andirfa, Hasan Basri dan M. Shabri A. Majid (2016)	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh	Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada. Namun hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

No	Peneliti	Judul	Hasil
5	Ni Putu Gina, Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6	Deni Agustiawan, Rindu Rika Gamayuni dan Yenni Agustina, (2018)	Pengaruh Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah	Opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi dan rasio efektivitas.
7	Mega Andani, Sarwani, dan Novita Weningtyas Respati (2019)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia	Ukuran pemerintah daerah dan opini audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi, sedangkan kemakmuran daerah dan belanja modal tidak mempengaruhi kinerja pemerintah provinsi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sample Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang berjumlah 15 kabupaten/kota dengan periode pengamatan tahun 2015-2017. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, penggunaan kriteria dalam pemilihan sampel sebagai berikut.

1. Kabupaten/kota yang mendapatkan skor EKPPD yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri tahun 2015-2017.
2. Kabupaten/kota yang menyajikan komponen laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota yaitu Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2015-2017.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah skor kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2015-2017. Skor kinerja ini berasal dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) pada tahun 2015-2017

dengan *range* nilai 0-4. Kualifikasi penilaian skor tersebut dibagi dalam empat penilaian, yaitu :

1. 0,00 – 1,00 = Rendah
2. 1,01 – 2,00 = Sedang
3. 2,01 – 3,00 = Tinggi
4. 3,01 – 4,00 = Sangat Tinggi

Evaluasi ini dilakukan berdasarkan penilaian *portfolio* secara *desk evaluation* terhadap data yang termuat di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2015-2017 dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh masing – masing pemerintah daerah. Skor kinerja Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dan dapat diakses melalui website <http://otda.kemendagri.go.id>.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen sering juga disebut dengan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat ketergantungan keuangan daerah, belanja modal, dan temuan audit BPK.

3.2.2.1 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan keuangan daerah diukur dengan jumlah dana transfer dari pemerintah pusat yang dapat dilihat dengan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah DAU dapat mempresentasikan tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah dengan membandingkannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi hasil perbandingan tersebut, berarti menunjukkan daerah tersebut sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Hal itu juga dapat menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah, apakah sudah dapat dikatakan optimal (Halim, 2012). Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis memilih DAU untuk menghitung besarnya tingkat ketergantungan keuangan daerah. Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat berbeda - beda, tergantung dengan kebutuhan dari masing – masing daerah. Pada penelitian Artha,dkk (2015), tingkat ketergantungan keuangan daerah diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum dibandingkan dengan total pendapatan. Maka pada penelitian ini variabel tingkat ketergantungan keuangan daerah diukur dengan:

$$\text{Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$$

3.2.2.2 Belanja Modal

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja modal adalah total belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja modal mengukur rasio realisasi anggaran belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah. Belanja modal dapat merefleksikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu tingkat realisasi belanja modal mengindikasikan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola menggunakan anggaran belanja modal yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Pada penelitian Sedyaningsih dan Zaky (2015), belanja modal diukur dengan besar realisasi belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah. Konsisten dengan penelitian tersebut Maka belanja modal pada penelitian ini diukur dengan:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

3.2.2.3 Temuan Audit BPK

Temuan audit BPK adalah kasus – kasus yang ditemukan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah atas pelanggaran yang dilakukan pemerintah terhadap ketentuan pengendalian internal maupun ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini menunjukkan seberapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemda dan kerugian material yang

ditimbulkan atas pelanggaran tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI mengungkapkan bahwa pada umumnya pengawasan atasan langsung masih lemah, sehingga masih ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung dan adanya temuan audit di beberapa daerah. Hasil dari pemeriksaan audit BPK berupa opini/pendapat, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Terdapat tiga jenis temuan audit BPK, yaitu audit keuangan, sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini temuan audit yang digunakan yaitu temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan karena peneliti ingin melihat tingkat kepatuhan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini temuan audit diukur berdasarkan banyaknya jumlah kasus pelanggaran yang ditemukan. Hal tersebut dikarenakan banyak jumlah temuan audit yang tidak lengkap (tidak mencantumkan nilai rupiah). Untuk menjaga keakuratan terhadap hasil penelitian oleh karenanya penulis menggunakan jumlah temuan kasus pelanggaran untuk mengukur temuan audit. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sedyaningsih dan Zaky (2015), berikut adalah rumus perolehan temuan audit dalam penelitian ini.

Temuan Audit = Temuan Audit (jumlah kasus)

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif karena dalam penelitian ini banyak menggunakan angka-angka dan analisis yang dilakukan menggunakan statistik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data untuk temuan audit BPK didapatkan dari Iktisar Pemeriksaan semester I dan II tahun 2015-2017 pada website www.bpk.go.id. Data temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan Pemerintah Daerah atas peraturan perundang – undangan tahun 2015-2017. Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, DAU, dan total realisasi anggaran pendapatan didapatkan di website <http://www.djpk.depkeu.go.id/>. Data peringkat skor kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung didapatkan melalui <http://otda.kemendagri.go.id/>.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, standar deviasi, maksimum, dan minimum dari masing-masing data sampel (Ghozali, 2018). Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2018). Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah tingkat ketergantungan

keuangan daerah, belanja modal, temuan audit BPK, dan skor kinerja pemerintah daerah.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk melihat dan memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan estimasi, tidak bias, dan konsisten.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal. Untuk menguji data yang berdistribusi normal akan digunakan alat uji normalitas, yaitu *one sample kolmogorov-smirnov*. Kelebihan dari uji *kolmogorov-smirnov* ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi variabel dependen memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%. Data penelitian yang baik adalah yang berdistribusi secara normal (Ghozali, 2018)

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model, peneliti akan melihat *tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF) dengan alat bantu program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami multikolinieritas. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) yang apabila memiliki nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan $VIF \leq 10$ berarti model regresi tersebut terbebas dari multikolinieritas.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghozali (2018) tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar scatterplotserta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data *cross section* (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2018).

Pengujian ada tidaknya masalah autokorelasi, peneliti akan menggunakan uji *run test* dengan alat bantu SPSS. Jika nilai signifikasni $> 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negatif.

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen . Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : kinerja pemerintah daerah

β_0 : konstanta

β : koefisien variabel independen

X1 : Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

X2 : Belanja Modal

X3 : Temuan Audit BPK

e : error term

3.4.3.2 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Pengujian ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R^2) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. . Untuk mengetahui berapakah proporsi pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yang dimasukkan dalam model, penelitian harus menggunakan nilai *Adjusted R Square* ($Adj R^2$) karena terdapat lebih dari satu variabel independen dan apabila hanya ada satu variabel independen maka menggunakan R Square (R^2) dalam menjelaskan pengaruh variabel independen (Ghozali, 2018).

3.4.3.3 Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel – variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5% (Ghozali, 2018). Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ (α) atau F hitung $< F$ tabel berarti hipotesis tidak terbukti, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ (α) atau F hitung $> F$ tabel berarti hipotesis tidak terbukti, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Ghozali, 2018)

3.4.3.4 Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig (*significance*). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah, belanja modal, dan temuan audit terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dengan demikian **hipotesis pertama dalam penelitian terdukung.**
2. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dengan demikian **hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak terdukung.**
3. Temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dengan demikian **hipotesis ketiga dalam penelitian ini terdukung.**

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lamanya proses yang dialami peneliti untuk memperoleh data dikarenakan lambatnya respon dari pihak/instansi terkait sebagai sumber yang mengeluarkan data.
2. Penelitian ini terkendala pada updating data, dikarenakan belum diterbitkannya data terbaru oleh Ditjen Otonomi Daerah-Kemendagri.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan , saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel penelitian untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia agar mempunyai daya generalisir yang lebih luas.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data yang lebih baru sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terkini dan memberikan kesimpulan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrian, G. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK dan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Jom Fekon*, Vol.3, No. 1.
- Agoes, S. 2017. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik, Buku 1, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat..
- Agustiawan, Deni., Gamayuni, Rindu. Rika., & Agustina, Yenni. 2018. Pengaruh Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 23, No. 2.
- Andani, M., Sarwani, S., & Respati, N. W. 2019. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 9, No. 2 Hlm: 111-130.
- Andirfa, Mulia, Hasan Basri & M. Shabri A. Majid. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. Vol. 5, No. 3 Hlm: 30-38.
- Antari, Ni Putu Gina Sukma, dan Ida, Bagus Panji Sendana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 2 Hlm: 1080-1110.
- Arens, A., Randal, E., & Beasley, M. S. (2011). *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terpadu* (Penerjemah Herman Wibowo). Jakarta: Salemba Empat.
- Artha, Risma. Diri., Basuki, Prayitno dan MT, Alamsyah. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB). *Jurnal InFestasi*, Vol. 11, hal. 214- 229.

- Bisma, I. D. G., & Susanto, H. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007. *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 4, No. 3 hlm: 76.
- Eisenhardt, K. M. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, Vol. 4 Hal 57-74.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, Michael C, and William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, No. 4:305-360.
- Mahsun, Mohamad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, A. A. P. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret* : Surakarta.
- Moehariono, E., & Si, D. M. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. (2011). *Auditing I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang *Klasifikasi Anggaran*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang *Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang *Penyajian Laporan Keuangan*.

Prawirosentono, Suryadi. 2008. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPF.

Putri, Megawati & Vita Fitria Sari. 2020. Pengaruh Kekayaan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Pengujian Kompleksitas Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat Tahun 2013 – 2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 2, No 3, Seri B, Agustus 2020, Hal 3085-3106.

Sedyaningsih, Peni dan Zaky, Achmad. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 3, No. 2 Hlm: 1-14.

Stolovitch, Harold D. and Keeps, Erica J. 1992. *Handbook of Human Performance Technology A Comprehensive Guide for Analysis and Solving Performance Problem in Organizations*. San Fransisco: Jersey-Bass Publisher.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sularso, H & Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, Vol. 1, No. 2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Usman, R. & Misra, F., (2019). Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah: Pengujian Legislative Power Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi* , 29(2).

Wijayanti, Y & Suryandari, Dhini. 2020. The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 9, No.1 Hlm: 30-37.